

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBDES DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA NAMBO ILIR TAHUN 2022-2024

Naura Allevia Tamsil, Laeli Nur Khanifah, Salsa Elsa Ulandari, Brigita Putri Marito, Puspa Indah Rahayu

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

#### Email:

[6670230145@untirta.ac.id](mailto:6670230145@untirta.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif pengelolaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir tahun 2022-2024. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Nambo Ilir cukup efektif, berdasarkan indikator seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan bergantung kepada partisipasi aktif masyarakat, kapasitas aparatur desa, dan transparansi dan akuntabilitas. Hambatan termasuk pencairan dana yang tertunda, kekurangan tenaga kerja, dan masalah teknis di lapangan. Penemuan ini menggarisbawahi perlunya penerapan konsep tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci:** APBDes, efektivitas, infrastruktur desa, partisipasi, good governance.

### Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Village Budget (APBDes) management in infrastructure development in Nambo Ilir Village from 2022 to 2024. A descriptive qualitative approach was employed through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that APBDes management in Nambo Ilir is relatively effective, based on indicators such as program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and implemented changes. The success of infrastructure development relies on active community participation, the capacity of village officials, and the principles of transparency and accountability. Challenges include delayed fund disbursement, labor shortages, and technical issues in the field. These findings highlight the need for the implementation of good governance principles in village financial management to align with community needs.

**Keywords:** APBDes, effectiveness, village infrastructure, participation, good governance.

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu aspek penting yang harus selalu dilakukan karena memainkan peran krusial dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan suatu daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk menggaungkan pembangunan di tingkat daerah, terutama di pedesaan. Hal tersebut diperlukan agar setiap desa memiliki kemajuan yang serupa, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dimana ada desa yang mengalami ketertinggalan akibat minimnya pembangunan.

Ketertinggalan pembangunan di pedesaan masih menjadi isu yang sering ditemukan saat ini di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah hingga saat ini sedang mengupayakan pembangunan berkelanjutan bagi desa-desa tertinggal dengan memanfaatkan anggaran daerah seefektif mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari fokus pelaksanaan APBDes, dimana pembangunan menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran APBDes. Pemerintah desa sekarang memiliki lebih banyak otoritas dan sumber daya untuk membangun daerah mereka secara mandiri dan berpartisipasi sejak program dana desa dimulai.

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi sangat penting untuk kemajuan desa di Indonesia. APBDes membantu desa melaksanakan berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai salah satu desa yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur, Desa Nambo Ilir di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, menarik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang efisiensi pengelolaan keuangan desanya.

Dalam kenyataannya, APBDes masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya di berbagai wilayah, termasuk Desa Nambo Ilir. Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengelola keuangan desa, yang mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Namun, ketidaksesuaian yang sering terjadi antara realisasi anggaran dan perencanaan sering berdampak langsung pada kualitas infrastruktur yang dibangun. Menurut Afrilia Ria (2021), transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran harus menjadi dasar pengelolaan keuangan desa. Jika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan dengan benar, penggunaan APBDes untuk meningkatkan infrastruktur desa akan menjadi kurang efektif.

Salah satu elemen penting yang harus diperiksa secara teratur adalah mengetahui seberapa efektif APBDes untuk membangun infrastruktur desa. Menurut Wandasari et al. (2023), efektivitas menunjukkan seberapa besar hasil yang diharapkan sesuai dengan input yang digunakan. Menurut Matlan (2008), menguraikan bahwa efektivitas pengelolaan dana dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu tepat kebijakan, tepat target, tepat pelaksana, dan tepat lingkungan (dalam Irmansyah, et al. 2021). Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut sangat diperlukan di Desa Nambo Ilir untuk memastikan bahwa dana desa telah dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Dinamika pengelolaan APBDes juga tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa. Laporan keuangan desa menunjukkan siklus pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan memberikan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan APBDes (Ibrahim, I., et al. 2024). Namun, penelitian Septiarini & Oktari (2024) menyatakan bahwa terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh desa dalam mengoptimalkan pengelolaan APBDes, seperti keterbatasan kapasitas SDM, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterlambatan dan kesalahan teknis. Sangat penting untuk mengidentifikasi komponen-komponen ini di Desa Nambo Ilir untuk membuat rencana dalam perbaikan dan pengembangan program pembangunan infrastruktur desa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir pada tahun 2022-2024? dan (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Nambo Ilir? Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana anggaran desa dimanfaatkan secara efektif, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan akan kajian berbasis data lapangan mengenai bagaimana APBDes benar-benar digunakan dalam pembangunan infrastruktur, terutama di desa-desa yang sedang berkembang seperti Nambo Ilir. Dengan memahami tingkat efektivitas, kendala, dan peluang dalam pelaksanaan anggaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pengelolaan keuangan publik di tingkat desa, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur. Temuan dari studi ini juga dapat memperkaya wacana ilmiah tentang praktik penggunaan anggaran publik di level lokal, serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan hasil pembangunan ke depan.

## KERANGKA TEORI

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Semakin dekat hasil suatu kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka efektivitasnya juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika hasilnya jauh dari tujuan tersebut, maka efektivitasnya dianggap rendah (Agustina, 2020).

Menurut pendapat Syam (2020), efektivitas menunjukkan seberapa besar hasil (output) yang diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan, berdasarkan jumlah masukan (input) yang digunakan, baik oleh suatu organisasi maupun individu. Jadi, dari berbagai pendapat tersebut, efektivitas bisa dimaknai sebagai proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Suatu kegiatan atau usaha disebut efektif jika bisa mencapai target yang dituju dan memberikan hasil yang sesuai harapan.

#### 1.1 Indikator Efektivitas

Menilai seberapa efektif suatu program bukanlah hal yang mudah, karena bisa dilihat dari berbagai sisi, tergantung pada siapa yang menilainya dan bagaimana ia memahaminya. Tingkat efektivitas biasanya diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah dirancang sebelumnya. Tapi, jika usaha yang dilakukan tidak sesuai arah, maka tujuan yang ingin dicapai bisa saja tidak terpenuhi, dan program tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Menurut Sutrisno (2010) dalam artikel jurnal Fauziah dkk., (2022:370), indikator-indikator efektivitas program meliputi:

- a. **Pemahaman Program:** Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik jika sasaran program memahami dengan jelas isi program tersebut. Oleh karena itu, pemahaman program sangat dibutuhkan agar kegiatan bisa dilaksanakan sesuai rencana.
- b. **Ketepatan Sasaran:** Efektivitas akan meningkat jika program diberikan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Artinya, sasaran harus tepat agar pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuannya.
- c. **Ketepatan Waktu:** Suatu program dianggap efektif jika pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sejak awal. Semakin tepat waktu pelaksanaan suatu kegiatan, maka efektivitasnya juga semakin baik.
- d. **Tercapainya Tujuan:** Program dinilai efektif jika tujuan yang dirancang di awal benar-benar tercapai. Hal ini bisa dilihat dari apakah hasil program sesuai dengan target dan manfaat yang sudah ditentukan.
- e. **Perubahan Nyata:** Efektivitas juga bisa dilihat dari adanya hasil atau perubahan yang benar-benar terjadi dan dirasakan langsung oleh pihak yang menjadi sasaran program tersebut.

### 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pemerintah desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang mengelola urusan masyarakat setempat. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD sebagai wakil masyarakat yang dipilih secara demokratis. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan tersebut. Pengelolaannya

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes untuk memastikan kualitas tata kelola keuangan desa meningkat. Dalam APBDes, tercakup komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDes disusun berdasarkan kebutuhan tahunan yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama lima tahun. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat tujuh hari kerja setelah ditetapkannya peraturan desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan melalui rekening kas desa dan dicatat secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang pada periode 2022-2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam proses dan dinamika pengelolaan APBDes (Moleong, 2005:5).

Pemilihan Desa Nambo Ilir didasarkan pada relevansi kondisi aktual desa yang aktif membangun infrastruktur dengan dana desa. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan aparat desa dan warga, serta dokumentasi dokumen resmi seperti laporan realisasi APBDes dan peraturan desa.

Meskipun menggunakan pendekatan kualitatif, data kuantitatif seperti besaran anggaran dan realisasi dana juga digunakan sebagai pendukung analisis. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengelolaan APBDes, termasuk faktor pendukung dan hambatan khususnya dalam pembangunan infrastruktur di satu wilayah dengan rentang waktu tertentu seperti di Desa Nambo Ilir periode 2022-2024.

## PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan APBDes Desa Nambo Ilir Tahun 2022-2024

#### 1. Profil Singkat Desa

Gambar 1. Peta Desa Nambo Ilir



Sumber: [namboilir.desa.id](http://namboilir.desa.id)

Desa Nambo Ilir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan luas wilayah sekitar 482,8 hektar, desa ini terletak di Jalan Raya Gorda-Bandung Km.1. Pemerintahan Desa Nambo Ilir dipimpin oleh Kepala Desa Sahriyudin, SE, bersama perangkat desa lainnya yang aktif menjalankan pelayanan publik. Desa

Nambo Ilir berkembang sebagai wilayah agraris yang subur, terutama untuk pertanian padi dan palawija. Jumlah penduduk Desa Nambo Ilir mencapai 8.504 jiwa, yang terdiri dari 4.230 laki-laki dan 4.274 perempuan.

## 2. Pengelolaan APBDes

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen utama pembangunan desa, yang mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang akuntabel. Di Desa Nambo Ilir, pengelolaan APBDes setiap tahun mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dengan komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi tulang punggung implementasi kebijakan pembangunan desa.

**Tabel 1. Pengelolaan APBDes Desa Nambo Ilir (2022-2024)**

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)	Pembiayaan (Rp)	SILPA Akhir (Rp)
2022	1.633.249.600	1.884.270.550	-251.020.950 (Defisit)	474.408.692	313.993.969
2023	1.866.870.536	1.826.199.900	40.670.636 (Surplus)	-	331.880.128
2024	1.939.145.602	2.130.021.231	-190.875.629 (Defisit)	-	121.958.130

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022-2024, Perdes No. 1 Tahun 2023, 2024, dan 2025.

Tahun 2022 menunjukkan dinamika fiskal yang cukup menantang. Pendapatan desa tercatat sebesar Rp 1.633.249.600, sementara belanja desa mencapai Rp 1.884.270.550. Hal ini menciptakan defisit anggaran sebesar Rp 251.020.950, yang berhasil ditutupi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 474.408.692. Dengan demikian, desa mengakhiri tahun dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 313.993.969. Komponen belanja terbesar dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Tahun 2023 menunjukkan pengelolaan yang relatif stabil. Total pendapatan mencapai Rp 1.866.870.536, sedangkan belanja mencapai Rp 1.826.199.900. Desa mengalami surplus anggaran sebesar Rp 40.670.636, belum termasuk SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 291.209.492. Akumulasi ini menghasilkan SILPA akhir tahun sebesar Rp 331.880.128, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tahun selanjutnya.

Tahun 2024 merupakan tahun dengan alokasi belanja pembangunan tertinggi, yakni mencapai Rp 932.877.075 dari total belanja Rp 2.130.021.231. Pendapatan desa sebesar Rp 1.939.145.602 kembali mengalami defisit, namun berhasil ditutupi dengan SILPA dari tahun sebelumnya. Menariknya, meskipun total belanja meningkat, terdapat efisiensi dalam realisasi, dan SILPA akhir tetap positif di angka Rp 121.958.130.

Dari ketiga tahun ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nambo Ilir mampu menjaga kesinambungan fiskal desa, terutama dengan memanfaatkan SILPA sebagai bantalan untuk menutupi defisit dan membiayai kegiatan pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan, drainase, dan gedung pemerintahan.

## 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nambo Ilir

Struktur organisasi Pemerintah Desa Nambo Ilir berperan dalam memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa berjalan secara tertib dan sesuai regulasi. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan tahun 2022 hingga 2024, struktur organisasi ini melibatkan unsur-unsur perangkat desa dengan fungsi yang saling

melengkapi. Setiap posisi dalam struktur memiliki peran yang jelas dalam mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**Tabel 2. Kepengurusan Pemerintahan Desa Nambo Ilir**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Sahriyudin, SE
2	Sekretaris Desa	Tohir
3	Kepala Urusan Keuangan	Saepudin
4	Kepala Urusan Perencanaan	Achmad Romly
5	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Tapip Saputra
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Muhamad Imron
7	Kepala Seksi Pelayanan	Syukur
8	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sapnah Nur Safitri

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022-2024, Perdes No. 1 Tahun 2023, 2024, dan 2025.

#### 4. Proses Perencanaan APBDes Dari Musyawarah Desa Hingga Penetapan Perdes

Proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Nambo Ilir merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan secara sistematis dan partisipatif, dimulai dari tahapan musyawarah dusun (musdus) hingga penetapan peraturan desa (Perdes). Perencanaan ini bertumpu pada prinsip keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sebelum sampai pada musyawarah desa (musdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginisiasi musyawarah tingkat dusun untuk menjangkau aspirasi warga secara langsung. Bapak Roni dari BPD menjelaskan bahwa *“Biasanya BPD ngajak dulu, kaya musdus. Kita ngumpulin tiap RW, terus RW ngumpulin RT dan tokoh masyarakat, lalu diskusiin kebutuhan tiap wilayah.”* Proses ini dilakukan secara intensif dan terbuka, memungkinkan setiap wilayah menyampaikan kebutuhan spesifik mereka untuk kemudian dirumuskan sebagai usulan resmi desa.

Setelah musdes selesai, usulan-usulan tersebut dibawa ke forum musdes. Dalam forum ini, usulan yang berasal dari masyarakat dibahas bersama antara pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat untuk kemudian diprioritaskan sesuai dengan skala kebutuhan dan kemampuan anggaran desa. Seperti dijelaskan oleh Bapak Imron, *“Sebelum bangun itu kita ngelakuin musyawarah, kita tanya nih, butuhnya apa masyarakat? Nah, kita musyawarahkan bareng-bareng.”* Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah desa bukan hanya sekadar forum formalitas, tetapi menjadi ruang deliberatif di mana keputusan pembangunan benar-benar berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Bahkan, desa menerapkan kebijakan inklusif dengan melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam musyawarah. Bapak Imron menambahkan, *“Tahun ini tuh diwajibkan bahkan anak di bawah umur ikut musyawarah. Misalnya dia pengen minta tempat bermain, itu bisa diusulkan.”* Kebijakan ini merupakan implementasi dari peraturan menteri dan gubernur yang mendukung pelibatan luas warga dalam perencanaan desa.

Setelah agenda prioritas ditentukan, pemerintah desa menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan draf APBDes yang mencakup semua program dan kegiatan berdasarkan ketersediaan dana. Namun, tidak jarang proses ini menemui tantangan, terutama terkait keterlambatan pencairan dana dari pusat atau provinsi. *“Kadang kita udah nganggarin dan udah rencana dari awal, uangnya nggak keluar, jadi tertunda. Jadi nggak semua bisa terbangun dari rencana awal itu,”* ungkap Bapak Imron. Realitas ini memaksa desa untuk menyesuaikan pelaksanaan program, bahkan dalam beberapa kasus harus dilakukan secara bertahap menunggu kecukupan anggaran. Ia menambahkan, *“Kalau uangnya belum nyampe 120 juta, kita nggak bakal mulai dulu. Nunggu cukup dulu baru jalan.”*

Setelah penyusunan dan penyesuaian anggaran dilakukan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi bersama antara pemerintah desa dan BPD sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes). Penetapan Perdes menandai legitimasi dan dasar hukum pelaksanaan seluruh kegiatan anggaran dalam satu tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, proses pengawasan dilakukan secara ketat oleh sekretaris desa, kepala desa, dan BPD untuk menjamin tidak ada penyelewengan dana. *“Ketika uang masuk, dia cek. Uang keluar pun harus tahu. Jadi nggak sembrono,”* kata Bapak Imron. Bahkan, untuk memastikan kualitas pekerjaan, desa juga menugaskan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melakukan survei lapangan sebelum menyusun laporan pertanggungjawaban. *“Ketika dia sudah beres, kita langsung bikin laporan pertanggungjawaban. Karena kalau lalai, bahaya,”* tambahnya.

Informasi tentang anggaran yang telah ditetapkan kemudian dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung saat musdes, lewat website resmi desa, maupun baliho besar di depan kantor desa. Bapak Roni menegaskan, *“Ditempel di depan kantor desa balihonya dan juga di website, terpampang jelas.”* Hal ini menjadi bagian dari komitmen desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Proses ini juga menjadi ruang evaluatif, di mana BPD turut memberikan masukan perbaikan terhadap pengelolaan anggaran ke depan, termasuk dari segi kualitas pelaksanaan fisik. *“Pasti dikasih masukan dan evaluasi, misalnya dari segi kualitas tukang yang membangun jalan,”* ujarnya.

Dengan demikian, proses perencanaan APBDes di Desa Nambo Ilir tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga mencerminkan praktik demokrasi lokal yang hidup, dengan mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, serta kepekaan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tantangan seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan lahan, dan ketidaksesuaian teknis di lapangan memang masih dijumpai, namun keberanian desa untuk terus berinovasi dan melibatkan seluruh elemen warga dalam pengambilan keputusan menjadikan proses ini sebagai cermin tata kelola desa yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhanarganya.

## 5. Skema dan Proporsi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Desa Nambo Ilir Tahun 2022-2024

Selama tahun 2022 hingga 2024, Pemerintah Desa Nambo Ilir memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar, yang meliputi jalan lingkungan rabat beton, jalan usaha tani, dan drainase. Pembangunan tersebut dilakukan di berbagai wilayah desa seperti Kampung Cikokak, Kampung Jempling, Kampung Panebong Curug, Kampung Gambar, dan Kampung Panebong Masjid. Selain pembangunan jalan, pada tahun 2022 dan 2023 pemerintah desa juga membangun saluran drainase (SPAL U-Ditch) di wilayah SPAL dan Panebong Curug, Pasir Jambe, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pembuangan air. Kegiatan ini didanai melalui berbagai sumber, yaitu APBDes, Dana Desa, dan APBD Kabupaten Serang. Fokus pembangunan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar aktivitas warga sehari-hari, terutama dalam hal mobilitas ke lahan pertanian, permukiman, dan fasilitas umum. Dengan perencanaan dan alokasi anggaran yang dilakukan setiap tahun, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bentuk nyata komitmen desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Tabel 3. Rincian Proyek Infrastruktur di Desa Nambo Ilir Berdasarkan Tahun 2022-2024**

Tahun	Lokasi	Jenis Infrastruktur	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
2022	Kampung P. Cikokak	Jalan Lingkungan Rabat Beton	173.882.000	APBDes
2022	Kampung Jempling	Jalan Lingkungan Rabat Beton	163.082.625	APBDes
2022	Drainase SPAL	U-Ditch	100.058.000	APBDes
2023	Kampung Panebong Curug	Jalan Lingkungan Rabat Beton	239.850.500	Dana Desa
2023	Panebong Curug & Pasir Jambe	Pembangunan Selokan (U-Ditch)	-	APBD Kab. Serang
2024	Kampung Gambar	Jalan Lingkungan Rabat Beton	268.438.250	Dana Desa
2024	Kampung Jempling	Jalan Lingkungan Rabat Beton	199.448.125	Dana Desa
2024	Kampung Panebong Masjid	Jalan Usaha Tani	67.500.000	Dana Desa

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022-2024, Perdes No. 1 Tahun 2023, 2024, dan 2025.

Tabel di atas menampilkan rincian proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Nambo Ilir selama periode 2022 hingga 2024. Fokus utama pembangunan terletak pada jalan rabat beton dan jalan usaha tani, serta dilengkapi dengan pembangunan saluran drainase di beberapa titik desa yang strategis.

**Tabel 4. Proporsi Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Desa Nambo Ilir terhadap Total Belanja Desa**

Tahun	Total Belanja Desa (Rp)	Anggaran Infrastruktur (Rp)	Sumber Dana	Persentase (%)
2022	1.884.270.550	436.922.625	APBDes	23,2%
2023	1.826.199.900	239.850.500	Dana Desa	13,1%
2024	2.130.021.231	535.386.375	Dana Desa	25,1%

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, proporsi anggaran infrastruktur terhadap total belanja desa menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Pemerintah Desa Nambo Ilir mengalokasikan anggaran sebesar Rp 436.922.625 untuk kegiatan infrastruktur, termasuk dua proyek jalan rabat beton dan satu proyek drainase (SPAL U-Ditch), yang setara dengan 23,2% dari total belanja desa tahun itu. Ini menandakan prioritas desa pada perbaikan akses jalan dan sistem drainase lingkungan.

Pada tahun 2023, proporsi anggaran infrastruktur menurun menjadi 13,1%, dengan satu proyek rabat beton yang diketahui nominalnya yaitu di Kampung Panebong Curug. Meskipun pada tahun ini juga dilaksanakan pembangunan selokan U-Ditch yang didanai oleh APBD Kabupaten Serang, anggaran tersebut tidak tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban desa, sehingga tidak dihitung dalam total proporsi infrastruktur desa.

Kemudian pada tahun 2024, proporsi anggaran infrastruktur kembali meningkat cukup signifikan menjadi 25,1%, menjadikannya sebagai tahun dengan alokasi pembangunan terbesar dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh pelaksanaan beberapa proyek strategis seperti jalan rabat beton di Kampung Gambar dan Kampung Jempling, serta jalan usaha tani di Kampung Panebong Masjid. Semua kegiatan tersebut dibiayai dari Dana Desa.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nambo Ilir secara konsisten menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas, dengan penyesuaian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan wilayah dan kapasitas keuangan setiap tahunnya.

## **B. Efektivitas Penggunaan APBDes untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Nambo Ilir**

### **1. Pemahaman Program**

Pengetahuan dan pemahaman tentang program adalah aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program memahami tujuan serta rincian kegiatan dari program pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir.

Dalam indikator pemahaman program, penggunaan APBDes untuk pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir terbukti efektif, terlihat dari seberapa baik masyarakat dan perangkat desa memahami prosedur serta tujuan program tersebut. Melalui wawancara dengan perangkat Desa Nambo Ilir (2025) menjelaskan,

*“Sebelum memulai pembangunan, kami mengadakan musyawarah desa yang melibatkan RT, RW, dan masyarakat. Kami bertanya kepada mereka tentang kebutuhan yang ada. Setelah itu, kami berdiskusi bersama untuk menentukan prioritas, misalnya jika masyarakat menginginkan pembangunan rabat beton, baru kami mulai prosesnya. Di akhir, kami juga melakukan penilaian dari masyarakat. Kami akan mengadakan musyawarah lagi untuk menyusun AKPJ tahun berikutnya, sehingga kami bisa menampung keluhan dan masukan terkait pembangunan yang telah dilaksanakan.”* (Wawancara dengan Bapak Muhamad Imron Kepala Seksi Pemerintahan, di Kantor Desa Nambo Ilir, 25 April 2025).

Proses musyawarah ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang alur program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, yang mendukung efektivitas penggunaan APBDes. Salah satu bentuk nyata pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir adalah proyek jalan rabat beton yang dibangun di Kampung Gambar. Jalan ini memiliki luas sekitar 1.186m<sup>2</sup> dan rampung pada 4 September 2024, menggunakan dana dari APBDes tahun 2024 sebesar Rp 268.438.250. Pembangunan ini bertujuan untuk mengatasi keluhan warga terkait kondisi jalan yang berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Pemerintah Desa Nambo Ilir merespons hal tersebut dengan menghadirkan solusi nyata yang tak hanya memperbaiki akses transportasi, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan jalan yang lebih layak dan aman, diharapkan mobilitas warga menjadi lebih lancar dan kesejahteraan meningkat.

Dalam upaya sosialisasi, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sosialisasi tidak hanya melibatkan perangkat desa, tetapi juga dihadiri oleh pihak kecamatan, unsur lembaga desa, serta para ketua RT/RW se-Desa Nambo Ilir. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, para ketua RT/RW secara rutin menyampaikan informasi dan edukasi kepada warganya mengenai pentingnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai alokasi dana APBDes, tujuan pembangunan, serta manfaat jangka panjang bagi desa. Dengan demikian, pemahaman program telah berhasil dicapai melalui prosedur musyawarah yang terstruktur dan sosialisasi aktif dari perangkat desa serta pihak-pihak terkait, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di

Desa Nambo Ilir untuk tahun 2022-2024 berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



**Gambar 2. Musrenbangdes Nambo Ilir**

*Sumber: namboilir-kibin.desa.id*

## 2. Ketepatan Sasaran

Sutrisno (2007) menyatakan bahwa ketepatan sasaran adalah indikator dalam menilai keberhasilan suatu program. Ketepatan sasaran merujuk pada sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan drainase, keberhasilan sangat bergantung pada kesesuaian proyek dengan kebutuhan nyata masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Tanpa ketepatan sasaran, program berpotensi gagal mencapai dampak yang diharapkan, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi tidak efektif.



**Gambar 3. Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase di Desa Nambo Ilir**

*Sumber: namboilir-kibin.desa.id*

Pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir pada tahun 2022 menjadi contoh ketepatan sasaran. Pemerintah Desa Nambo Ilir, melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), memanfaatkan Dana Desa untuk membangun jalan rabat beton di Kampung Panebong Cikokak dan Kampung Jempling, serta saluran air (drainase) di Kampung Gorda Nagreg. Proyek ini bertujuan memperbaiki jalan dan membangun drainase di kawasan pemukiman warga, yang secara langsung mendukung peningkatan aksesibilitas dan pengelolaan air untuk mencegah banjir. Pemilihan lokasi dan jenis infrastruktur menunjukkan adanya upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di Kampung Panebong Cikokak dan Kampung Jempling, seperti akses jalan yang lebih baik dan sistem drainase yang memadai.

Keberhasilan proyek ini bergantung pada sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi kebutuhan dilakukan. Dengan melibatkan warga, pemerintah desa telah memastikan bahwa pembangunan jalan dan drainase adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Selain itu, penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan oleh TPK menunjukkan komitmen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### 3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menurut Sutrisno (2007), sebuah program dianggap tepat waktu jika dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Contoh nyata terlihat dalam pembangunan jalan rabat beton di Kampung Gambar, Desa Nambo Ilir. Proyek seluas 1.186 m<sup>2</sup> ini dimulai pada 12 Agustus 2024 dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada 4 September 2024. Capaian ini menunjukkan penerapan prinsip ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur di desa.

Dalam wawancara dengan perangkat Desa Nambo Ilir (2025), menjelaskan bahwa keberhasilan ini karena perencanaan yang matang dan pengelolaan tenaga kerja yang efisien.

*“Selama ini sih selalu selesai sesuai rencana, karena kita benar-benar atur dari awal.*

*Termasuk soal tenaga kerjanya, kita pakai swadaya masyarakat misalnya kalau bangun di Kampung Gambar, ya yang ngerjain warga situ juga. Kita tanya dulu, misalnya sanggup nggak ngerjain dalam 24 hari? Kalau mereka bilang sanggup, ya harus sanggup. Lagipula akses di sini lumayan gampang, jadi nggak banyak hambatan. Paling telat juga cuma kalau cuaca lagi kurang bagus, misalnya hujan.”*

(Wawancara dengan Bapak Muhamad Imron Kepala Seksi Pemerintahan, di Kantor Desa Nambo Ilir, 25 April 2025).

Penggunaan tenaga kerja setempat tidak hanya mendukung pemberdayaan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi masalah logistik. Komunikasi yang baik dengan warga setempat memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan, yaitu 24 hari. Akses yang mudah ke lokasi juga berkontribusi pada kelancaran pekerjaan. Meskipun faktor lain seperti cuaca buruk terutama hujan dapat menghambat proses pembangunan namun dampaknya sangat minim karena proyek pembangunan jalan ini tetap bisa diselesaikan tanpa adanya keterlambatan dan penurunan kualitas dari proyek pembangunan jalan.

Keberhasilan proyek jalan rabat beton ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tepat waktu yang dicapai melalui perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, dan penyesuaian terhadap kondisinya langsung. Sehingga, masyarakat cepat merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun secara efektif.

### 4. Tercapainya Tujuan

Efektivitas penggunaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur di Desa Nambo Ilir, khususnya di Kampung Panebong Masjid, dapat dilihat dari sejauh mana tujuan proyek berhasil dicapai. Menurut Sutrisno (2007), suatu program dianggap efektif apabila hasil pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2023, dialokasikan dana sebesar Rp 67.500.000 dari Dana Desa untuk pembangunan Jalan Usaha Tani. Jika dilihat dari realisasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran, proyek ini berhasil direalisasikan sesuai rencana, baik dari segi pekerjaan maupun pemanfaatan dana. Tidak ditemukan pembengkakan biaya ataupun hambatan selama proses pembangunan.

Efektivitas hasil juga terlihat dari dampak pembangunan terhadap akses dan produktivitas masyarakat. Sebelum dibangun, jalan yang digunakan petani untuk mengangkut hasil pertanian masih berupa tanah dan sulit dilalui saat musim hujan. Setelah jalan usaha tani dibangun, mobilitas warga terutama petani menjadi lebih lancar. Hasil panen dapat didistribusikan lebih cepat dan efisien ke pasar desa maupun kecamatan.

## 5. Perubahan Nyata



**Gambar 4. Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Rabat Beton**

*Sumber: namboilir-kibin.desa.id*

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Nambo Ilir untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022-2024 menunjukkan efektivitas yang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kondisi desa. Alokasi anggaran Desa Nambo Ilir untuk infrastruktur mengalami fluktuasi, dengan proporsi 23,2% pada tahun 2022, menurun menjadi 13,1% pada tahun 2023, dan kemudian meningkat menjadi 25,1% pada tahun 2024. Proyek utama yang dilaksanakan mencakup pembangunan jalan rabat beton dan sistem drainase U-Ditch di Kampung Panebong Curug, Gambar, Jempling, serta jalan usaha tani di Kampung Panebong Masjid menggunakan Dana Desa, kecuali selokan U-Ditch tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Serang.



**Gambar 5. Kondisi Drainase di Desa Nambo Ilir Sebelum dan Sesudah Pembangunan**

*Sumber: namboilir-kibin.desa.id*

Perubahan terlihat dari peningkatan aksesibilitas desa, terutama melalui perbaikan jalan yang memudahkan mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian, sehingga mendukung perekonomian masyarakat. Salah satu perubahan nyata yang dirasakan adalah berkurangnya genangan air dan tidak adanya banjir lagi dari pembangunan sistem drainase yang lebih baik. Menurut Sutrisno (2007), efektivitas pembangunan infrastruktur dapat diukur dari perubahan nyata yang dirasakan oleh pihak terkait, dan di Nambo Ilir, hal ini terlihat dari perbaikan akses jalan dan sistem drainase yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Nambo Ilir

#### 1. Faktor Pendukung

##### a. Kapasitas Aparatur Desa

Aspek utama yang mendukung terlaksananya program infrastruktur di daerah Nambo Ilir secara efektif adalah kompetensi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah desa secara rutin menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun kegiatan, dan menetapkan kerangka pelaksanaan sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kemampuan ini ditunjukkan dengan perencanaan dan pelaksanaan RKPDes yang efektif serta akuntabilitas anggaran yang dilakukan secara tepat waktu dan sistematis. Evaluasi berkala dilakukan pasca-konstruksi untuk menghindari ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan.

Aparatur desa memiliki keahlian dalam menyusun dan mengelola APBDes. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, penyusunan RAB dilaksanakan dengan cermat, dan pelaporan diselesaikan segera setelah proyek selesai untuk memastikan tidak ada laporan yang terlewat.

*“Kalau dari desa itu, jadi kita sistemnya gini... ketika kegiatan udah beres kita langsung bikin laporan pertanggungjawaban itu. Karena kan khawatirnya ketika lalai, kan bahaya.”* (Wawancara dengan Bapak Muhamad Imron Kepala Seksi Pemerintahan, di Kantor Desa Nambo Ilir, 25 April 2025).

#### **b. Keterlibatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa (musdes) telah berkembang menjadi praktik adat yang menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan aspirasi melalui RT/RW, yang mengarah pada pilihan tentang tujuan pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok individu di bawah usia 18 tahun. Masyarakat berpartisipasi sebagai pekerja lokal dalam inisiatif pembangunan, termasuk pembangunan jalan beton di Kampung Gambar dan proyek jalan pertanian. Hal ini tidak hanya memfasilitasi penyelesaian tugas dengan cepat tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab atas hasil pembangunan.

#### **c. Transparansi dan Akuntabilitas**

Pemerintah daerah Nambo Ilir menunjukkan keterbukaan dengan menyebarkan informasi anggaran kepada publik melalui situs web setempat dan spanduk yang dipajang di kantor desa.

*“Kita upload dan share di website desa, dan pasang spanduk di kantor desa.”* (Wawancara dengan Bapak Muhamad Imron Kepala Seksi Pemerintahan, di Kantor Desa Nambo Ilir, 25 April 2025).

Laporan pertanggungjawaban dibuat segera setelah proyek selesai untuk menghilangkan keterlambatan pelaporan. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh BPD dan kepala desa untuk menjamin tidak adanya perbedaan dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes meningkatkan akuntabilitas dan terhubung dengan sistem pusat.

#### **d. Kebijakan Pemerintah**

Desa Nambo Ilir diuntungkan oleh program pemerintah pusat, termasuk peraturan yang meningkatkan keterlibatan publik. Contohnya adalah perlunya melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan bersifat inklusif dan adil. Selain itu, Dana Desa dan bantuan dari APBD Kabupaten Serang, yang ditunjukkan dengan pembangunan saluran U-Ditch pada tahun 2023, menunjukkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa.

*“Tahun ini tuh diwajibkan, bahkan anak umur 18 tahun ke bawah itu musdesnya harus ikut katanya. Di bawah umur juga harus ikut, misalkan dia pengen minta taman bermain., terbaru itu dari peraturan menteri.”* (Wawancara dengan Bapak Muhamad Imron Kepala Seksi Pemerintahan, di Kantor Desa Nambo Ilir, 25 April 2025).

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas**

Meskipun aparat pemerintah desa memiliki kompetensi dalam penyusunan perencanaan, terdapat kendala dalam manajemen teknis di wilayah tersebut. Masalah muncul ketika masyarakat setempat secara tidak sengaja menggunakan sumber daya konstruksi, seperti semen, untuk penggunaan pribadi. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendidikan berkelanjutan bagi warga untuk menjaga efisiensi anggaran.

### **b. Masalah Administratif**

Pembatasan administratif menjadi kendala yang cukup besar bagi pelaksanaan program. Keterlambatan pencairan dana hibah dari pemerintah pusat atau daerah menghambat dimulainya operasi tepat waktu.

*“Kadang kita udah nganggarin dan udah rencana dari awal, uangnya nggak keluar.*

*Jadi ketunda.”* (Wawancara dengan Bapak Muhamad Imron Kepala Seksi Pemerintahan, di Kantor Desa Nambo Ilir, 25 April 2025).

Hal ini mengakibatkan beberapa inisiatif tidak terealisasi, sehingga menumbuhkan persepsi negatif dalam masyarakat bahwa tujuan mereka tidak tercapai, meskipun ada kendala yang berasal dari sumber eksternal di luar yurisdiksi desa. Ketika dana tidak sepenuhnya didistribusikan, otoritas desa memilih untuk menunda pembangunan guna mencegah proyek mandek di tengah jalan.

### **c. Defisit Fiskal**

Dana yang diterima sering tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pemerintah desa harus mengkalibrasi ulang operasional atau menambah defisit dengan keuangan pribadi, seperti yang telah dilakukan oleh kepala desa dalam beberapa kasus. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana awal dan pengeluaran aktual, sehingga secara tidak langsung mengurangi efektivitas penggunaan Anggaran Desa.

### **d. Faktor Teknis dan Alam**

Kendala tambahan timbul dari keadaan lapangan, termasuk cuaca buruk (seperti curah hujan) yang dapat menghambat proses konstruksi, di samping tantangan teknis seperti perbedaan antara perkiraan kuantitas bahan bangunan dan kondisi aktual yang dihadapi selama pelaksanaan.

Dengan mengenali poin-poin yang mendukung dan menghambat ini, pemerintah desa diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelaksanaan inisiatif pembangunan infrastruktur yang akan datang. Peningkatan dapat difokuskan pada peningkatan pengawasan distribusi bahan bangunan, penguatan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat pencairan dana, dan penyediaan konseling masyarakat yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan pembangunan secara kolaboratif.

## **D. Refleksi Kritis Terhadap Teori dan Praktik**

Temuan di Desa Nambo Ilir menunjukkan kesesuaian yang positif antara teori pengelolaan keuangan publik yang efektif dengan realitas pelaksanaan di tingkat dasar. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), desa ini mampu mengimplementasikan empat prinsip utama tata kelola keuangan desa transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran ke dalam praktik nyata yang memberikan pengaruh besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip transparansi di Desa Nambo Ilir terwujud dalam ketersediaan informasi yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, pemerintah desa selalu menginformasikan anggaran melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari papan pengumuman di kantor desa, situs resmi desa, hingga presentasi langsung dalam forum-forum pertemuan masyarakat. Transparansi ini lebih dari sekadar formalitas administratif; ini adalah komitmen tulus untuk membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai sumber-sumber pendapatan desa, pengalokasian anggaran untuk berbagai program pembangunan, serta kemajuan pelaksanaan kegiatan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Tangahu yang menegaskan bahwa transparansi merupakan dasar penting dalam pengelolaan APBDes yang efisien.



Dimensi akuntabilitas di Desa Nambo Ilir terlihat dalam sistem pertanggungjawaban yang terencana dan berkesinambungan. Pemerintah desa telah menciptakan sistem pelaporan rutin yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif kepada pemerintah pusat, tetapi juga memberikan akuntabilitas yang signifikan kepada warga. Setiap program serta kegiatan yang didanai melalui APBDes dilengkapi dengan dokumentasi yang mendetail, mencakup laporan keuangan, foto pelaksanaan, dan evaluasi dampaknya. Mekanisme audit internal memperkuat sistem akuntabilitas ini dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat dalam tugas pengawasan. Praktik ini membenarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan APBDes.

Aspek partisipasi dalam pengelolaan APBDes di Desa Nambo Ilir diwujudkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahapan penyusunan APBDes diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang diikuti oleh beragam elemen masyarakat, seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat. Forum ini bukan hanya sebuah upacara, tetapi merupakan tempat deliberatif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan, menetapkan prioritas pembangunan, dan berperan dalam menentukan pengalokasian sumber daya. Selama pelaksanaan program, masyarakat berperan dalam pemantauan dan pengawasan, memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal. Pendekatan partisipatif ini mencerminkan demokratisasi pembangunan desa yang sesuai dengan semangat otonomi desa.

Prinsip disiplin anggaran di Desa Nambo Ilir diterapkan dengan mematuhi secara ketat regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang menjamin setiap pengeluaran sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBDes. Tidak terdapat penyimpangan atau penggunaan anggaran di luar pos yang telah ditentukan tanpa melalui proses perubahan APBDes yang resmi. Pencatatan serta pelaporan keuangan dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menjamin traceability dan audit trail yang jelas. Disiplin anggaran ini juga terlihat dari ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, BPD, serta masyarakat.

Efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Nambo Ilir dapat dinilai dari dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Program-program yang dibiayai oleh APBDes sukses dalam meningkatkan mutu infrastruktur desa, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kapasitas SDM. Infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya mendapatkan perbaikan yang berarti, mempermudah akses bagi masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi. Program peningkatan ekonomi masyarakat, seperti dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan, sukses dalam meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Keselarasannya antara teori dan praktik di Desa Nambo Ilir menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan APBDes bukan hal yang mustahil, tetapi dapat diraih dengan komitmen, kapasitas, dan sistem yang sesuai. Kepemimpinan yang berwawasan, perangkat desa yang terampil, serta keterlibatan masyarakat yang aktif merupakan unsur-unsur utama yang mendukung terciptanya pengelolaan APBDes yang efisien. Pengalaman Desa Nambo Ilir dapat menjadi contoh dan motivasi bagi desa-desa lain dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Nambo Ilir periode 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil yang cukup positif namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek.

Dari segi perencanaan, pengelolaan APBDes telah mengikuti prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini sejalan dengan teori good governance yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Namun, koordinasi antara BPD dan pemerintah desa masih perlu diperkuat untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik.

Dalam aspek pelaksanaan, realisasi anggaran untuk infrastruktur mencapai rata-rata 87% dari total alokasi dana. Pencapaian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang baik sesuai dengan standar Kemendagri yang menetapkan minimal 80% untuk kategori efektif. Pembangunan jalan desa, drainase, dan fasilitas umum telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana juga telah dilakukan melalui papan informasi dan laporan pertanggungjawaban yang rutin. Prinsip akuntabilitas publik tercermin dari keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan literasi masyarakat dalam memahami laporan keuangan desa. Tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, dan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk meningkatkan efektivitas ke depan, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem pelaporan, dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal

- Aditya, S. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran Studi Kasus Di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Repository Universitas Sanata Dharma. <https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/110>
- Amallia, Chairun, & Masyhuri Hamidi. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* 4 (2), 346-361. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/58476>
- Arief, A. M. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/358735310\\_PENERAPAN\\_AKUNTABILITAS\\_EFEKTIVITAS\\_DAN\\_TRANSPARANSI\\_DALAM\\_MEWUJUDKAN\\_GOOD\\_GOVERNANCE\\_STUDI\\_PEMERINTAH\\_DESA\\_BANABUNGI](https://www.researchgate.net/publication/358735310_PENERAPAN_AKUNTABILITAS_EFEKTIVITAS_DAN_TRANSPARANSI_DALAM_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_STUDI_PEMERINTAH_DESA_BANABUNGI)
- Agustina, F., & Debby, P. P. P. (2020). Pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, pengetahuan manajer, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 35-48.
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C. S., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367-375.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: Studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.



- Hardika, M., Putri, A. M., & Sari, D. P. P. (2022). Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(2), 193-204.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002-1009.
- Irmansyah, Sri, W., & Rahmad, S. H. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(8).
- Mulyana, & Al Habib, M. (2024). Efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11(1), 1-14.
- Prakarsa, N. A., Siti, A., & Didik, G. S. (2024). Efektivitas organisasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. *Journal of Social Community*, 9(1), Juni 2024.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Syam, S. (2020). Pengaruh efektivitas dan efisiensi kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.
- Tampi, J., Daisy, S. M., & Steeva, Y. L. (2023). Efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), Mei 2023.
- Timuneno, A. Y. W., Rae, M. V., & Malut, M. G. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NAISAU KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 2(2), 346-363.
- Triani, T., & Afiyah, S. (2021). Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pembangunan Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 13-23.
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).

### Sumber Berita

- Pemerintah Desa Nambo Ilir. (2022, 5 Desember). Pembangunan jalan rabat beton di Kampung Gambar. Diakses dari <https://namboilir-kibin.desa.id/berita-desa/pembangunan-jalan-rabat-beton-di-kampung-gambar/>
- Pemerintah Desa Nambo Ilir. (2023, 12 Januari). Pembangunan jalan lingkungan rabat beton. Diakses dari <https://namboilir-kibin.desa.id/berita-desa/pembangunan-jalan-lingkungan-rabat-beton/>
- Pemerintah Desa Nambo Ilir. (2022, 30 Desember). Pembangunan infrastruktur Desa Nambo Ilir T.A. 2022. Diakses dari <https://namboilir-kibin.desa.id/berita-desa/pembangunan-insfratuktur-desa-nambo-ilir-t-a-2022/>

### Dokumen Resmi

- Pemerintah Desa Nambo Ilir. (2023, Januari 17). Peraturan Desa Nambo Ilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Desa Nambo Ilir.



---

Pemerintah Desa Nambo Ilir. (2024, Januari 12). Peraturan Desa Nambo Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Desa Nambo Ilir.

Pemerintah Desa Nambo Ilir. (2025, Januari 14). Peraturan Desa Nambo Ilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Desa Nambo Ilir.

### **Wawancara**

Imron, M. (2025, April 25). Wawancara langsung tentang pengelolaan APBDes. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Nambo Ilir.

Roni. (2025, April 25). Wawancara langsung tentang pengelolaan APBDes. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Nambo Ilir.